

## II TINJAUAN PUSTAKA

### A. Teori Pengembangan Wilayah

Dalam banyak kepustakaan tentang pembangunan, terdapat beberapa pendekatan dan teori. Menyebut beberapa diantaranya adalah *growth theory*, *rural development theory*, *agro first theory*, *basic needs theory*, dan lain sebagainya. Teori-teori pembangunan itu memuat berbagai pendekatan ilmu sosial yang berusaha menangani masalah keterbelakangan. Teori pembangunan benar-benar lepas landas hanya setelah diketahui bahwa persoalan pembangunan di Dunia Ketiga bersifat khusus dan secara kualitatif berbeda dari “*transisi orisinal*”. Sepanjang evolusinya, teori pembangunan menjadi semakin kompleks dan nondisipliner. Dengan demikian, tidak akan ada definisi baku dan final mengenai pembangunan, yang ada hanyalah usulan mengenai apa yang seharusnya diimplikasikan oleh pembangunan dalam konteks tertentu (Syamsul, 2005).

Salah satu teori pembangunan wilayah adalah pertumbuhan tak berimbang (*unbalanced growth*) yang dikembangkan oleh Hirschman dan Myrdal.

Pengembangan wilayah merupakan proses perumusan dan pengimplementasian tujuan-tujuan pembangunan dalam skala supra urban.

Pembangunan wilayah pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan sumber daya alam secara optimal melalui pengembangan ekonomi lokal,

yaitu berdasarkan kepada kegiatan ekonomi dasar yang terjadi pada suatu wilayah.

Teori pertumbuhan tak berimbang memandang bahwa suatu wilayah tidak dapat berkembang bila ada keseimbangan, sehingga harus terjadi ketidakseimbangan. Penanaman investasi tidak mungkin dilakukan pada setiap sektor di suatu wilayah secara merata, tetapi harus dilakukan pada sektor-sektor unggulan yang diharapkan dapat menarik kemajuan sektor lainnya. Sektor yang diunggulkan tersebut dinamakan sebagai *leading sektor*.

Sesungguhnya teori pembangunan terkait erat dengan strategi pembangunan, yakni perubahan struktur ekonomi dan pranata sosial yang diupayakan untuk menemukan solusi yang konsisten bagi persoalan yang dihadapi. Berbagai pendekatan menyangkut tema-tema kajian tentang pembangunan, satu diantaranya adalah mengenai isu pembangunan wilayah. Secara luas, pembangunan wilayah diartikan sebagai suatu upaya merumuskan dan mengaplikasikan kerangka teori ke dalam kebijakan ekonomi dan program pembangunan yang di dalamnya mempertimbangkan aspek wilayah dengan mengintegrasikan aspek sosial dan lingkungan menuju tercapainya kesejahteraan yang optimal dan berkelanjutan (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Perencanaan pembangunan wilayah semakin relevan dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi dalam aspek kewilayahan. Hoover dan Giarratani (*dalam* Nugroho dan Dahuri, 2004), menyimpulkan tiga pilar penting dalam proses pembangunan wilayah, yaitu:

1. Keunggulan komparatif (*imperfect mobility of factor*). Pilar ini berhubungan dengan keadaan ditemukannya sumber-sumber daya tertentu yang secara fisik relatif sulit atau memiliki hambatan untuk digerakkan antar wilayah. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lokal (bersifat khas atau endemik, misalnya iklim dan budaya) yang mengikat mekanisme produksi sumber daya tersebut sehingga wilayah memiliki komparatif. Sejauh ini karakteristik tersebut senantiasa berhubungan dengan produksi komoditas dari sumber daya alam, antara lain pertanian, perikanan, pertambangan, kehutanan, dan kelompok usaha sektor primer lainnya.
2. Aglomerasi (*imperfect divisibility*). Pilar aglomerasi merupakan fenomena eksternal yang berpengaruh terhadap pelaku ekonomi berupa meningkatnya keuntungan ekonomi secara spasial. Hal ini terjadi karena berkurangnya biaya-biaya produksi akibat penurunan jarak dalam pengangkutan bahan baku dan distribusi produk.
3. Biaya transport (*imperfect mobility of good and service*). Pilar ini adalah yang paling kasat mata mempengaruhi aktivitas perekonomian. Implikasinya adalah biaya yang terkait dengan jarak dan lokasi tidak dapat lagi diabaikan dalam proses produksi dan pembangunan wilayah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan wilayah antara lain dipengaruhi oleh aspek-aspek keputusan lokasional, terbentuknya sistem perkotaan, dan mekanisme aglomerasi. Istilah pertumbuhan wilayah dan perkembangan wilayah sesungguhnya tidak bermakna sama.

Pertumbuhan dan perkembangan wilayah merupakan suatu proses kontiniu

hasil dari berbagai pengambilan keputusan di dalam ataupun yang mempengaruhi suatu wilayah.

Perkembangan wilayah senantiasa disertai oleh adanya perubahan struktural. Wilayah tumbuh dan berkembang dapat didekati melalui teori sektor (*sektor theory*) dan teori tahapan perkembangan (*development stages theory*). Teori sektor diadopsi dari Fisher dan Clark yang mengemukakan bahwa berkembangnya wilayah, atau perekonomian nasional, dihubungkan dengan transformasi struktur ekonomi dalam tiga sektor utama, yakni sektor primer (pertanian, kehutanan dan perikanan), serta sektor tertier (perdagangan, transportasi, keuangan dan jasa). Perkembangan ini ditandai oleh penggunaan sumber daya dan manfaatnya, yang menurun di sektor primer, meningkat di sektor tertier, dan meningkat hingga pada suatu tingkat tertentu di sektor sekunder.

Sedangkan teori tahapan perkembangan dikemukakan oleh para pakar seperti Rostow, Fisher, Hoover, Thompson dan lain-lain. Teori ini dianggap lebih mengadopsi unsur spasial dan sekaligus menjembatani kelemahan teori sektor. Pertumbuhan dan perkembangan wilayah dapat digambarkan melalui lima tahapan.

1. Wilayah dicirikan oleh adanya industri yang dominan. Pertumbuhan wilayah sangat bergantung pada produk yang dihasilkan oleh industri tersebut, antara lain minyak, hasil perkebunan dan pertanian, dan produk-produk primer lainnya. Industri demikian dimiliki oleh banyak negara dalam awal pertumbuhannya.

2. Tahapan ekspor kompleks. Tahapan ini menggambarkan bahwa wilayah telah mampu mengekspor selain komoditas dominan juga komoditas kaitannya. Misalnya, komoditas dominan yang diekspor sebelumnya adalah minyak bumi mentah, maka dalam tahapan kedua wilayah juga mengekspor industri (metode) teknologi penambangan (kaitan ke belakang) dan produk-produk turunan dari minyak bumi (kaitan ke depan) misalnya premium, solar dan bahan baku plastik.
3. Tahapan kematangan ekonomi. Tahapan ketiga ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi wilayah telah terdiversifikasi dengan munculnya industri substitusi impor, yakni industri yang memproduksi barang dan jasa yang sebelumnya harus diimpor dari luar wilayah. Tahapan ketiga ini juga memberikan tanda kemandirian wilayah dibandingkan wilayah lainnya.
4. Tahapan pembentukan metropolis (*regional metropolis*). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah menjadi pusat kegiatan ekonomi untuk mempengaruhi dan melayani kebutuhan barang dan jasa wilayah pinggiran. Dalam tahapan ini pengertian wilayah fungsional dapat diartikan bahwa aktivitas ekonomi wilayah lokal berfungsi sebagai pengikat dan pengendali kota-kota lain. Selain itu, volume aktivitas ekonomi ekspor sangat besar yang diiringi dengan kenaikan impor yang sangat signifikan.
5. Tahapan kemajuan teknis dan profesional (*technical professional virtuosity*). Tahapan ini memperlihatkan bahwa wilayah telah memberikan peran yang sangat nyata terhadap perekonomian nasional. Dalam wilayah

berkembang produk dan proses-proses produksi yang relatif canggih, baru, efisien dan terspesialisasi. Aktivitas ekonomi telah mengandalkan inovasi, modifikasi, dan imitasi yang mengarah kepada pemenuhan kepuasan individual dibanding kepentingan masyarakat. Sistem ekonomi wilayah menjadi kompleks (*economic reciproating system*), mengaitkan satu aktivitas dengan aktivitas ekonomi lainnya (Nugroho dan Dahuri, 2004).

Dalam kerangka pengembangan wilayah, perlu dibatasi pengertian “wilayah” yakni ruang permukaan bumi dimana manusia dan makhluk lainnya dapat hidup dan beraktivitas. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang, wilayah diartikan sebagai kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Dalam kerangka pembangunan nasional, perencanaan pengembangan wilayah dimaksudkan untuk memperkecil perbedaan pertumbuhan kemakmuran antar wilayah atau antar daerah. Di samping itu, diusahakan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara perkotaan dan pedesaan (Jayadinata, 1999).

## **B. Perencanaan Wilayah**

Dalam teori perencanaan terdapat beberapa tipologi, antara lain *rational planning model*; *incremental planning model*; dan *strategic planning model* (Etzioni, 1967).

1. Pendekatan komprehensif (*rational planning model*) merupakan suatu kerangka pendekatan logis dan teratur, mulai dari diagnosis sampai kepada tindakan berdasarkan kepada analisis fakta yang relevan, diagnosis masalah yang dikaji melalui kerangka teori dan nilai-nilai, perumusan tujuan dan sasaran untuk memecahkan masalah, merancang alternatif cara-cara untuk mencapai tujuan, dan pengkajian efektivitas cara-cara tersebut. Pendekatan ini memerlukan survey yang komprehensif pada semua alternatif yang ada untuk mendapatkan informasi yang lengkap dalam pengambilan keputusan yang rasional.
2. Pendekatan inkremental (*incremental planning model*). Memilih diantara rentang alternatif yang terbatas yang berbeda sedikit dari kebijaksanaan yang ada. Pengambilan keputusan dalam pendekatan ini dibatasi pada kapasitas yang dimiliki oleh pengambil keputusan serta mengurangi lingkup dan biaya dalam pengumpulan informasi. Pengambil keputusan hanya berfokus terhadap kebijaksanaan yang memiliki perbedaan yang inkremental dari kebijaksanaan yang telah ada.
3. Pendekatan mixed-scanning (*strategic planning model*). Kombinasi dari elemen rasionalistik yang menekankan pada tugas analitik penelitian dan pengumpulan data dengan elemen inkremental yang menitikberatkan pada tugas interaksional untuk mencapai konsensus.

Proses yang tercakup dalam *mixed scanning* ini adalah *strength*, *weakness*, *opportunity* dan *threat* (SWOT) analisis yang hasilnya adalah berupa strategic planning yaitu proses untuk menentukan komponen-komponen yang dianggap prioritas atau utama dan yang tidak. Kemajuan yang diharapkan

dalam proses ini adalah terjadinya efek bergulir (*snowballing*) dari komponen yang diprioritaskan tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam proyek akhir ini adalah pendekatan perencanaan *mixed scanning* dengan melakukan analisis SWOT di sektor pertanian sebagai komponen strategis yang diharapkan dapat menimbulkan efek bergulir.

Perencanaan wilayah di berbagai negara tidak sama, tergantung kepada kehidupan ekonomi dan masalah yang dihadapi. Secara historis setidaknya terdapat tiga pendekatan perencanaan wilayah (Jayadinata, 1999), yaitu:

1. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada masalah kota yang bersifat sosial. Pelaksanaannya meliputi perbaikan bagian kota yang keadaan yang telah rusak dan tidak memenuhi standar, pemugaran kota, pembuatan kota satelit untuk membantu meringankan kota industri yang terlalu padat penduduknya. Titik berat perencanaan wilayah semacam ini ditujukan pada kota yang besar dan wilayah sekelilingnya (*hinterland*) yang dapat menunjang kota dalam perencanaan kota dan wilayah.
2. Perencanaan wilayah yang memusatkan perhatiannya kepada wilayah yang penduduknya banyak menganggur dan dalam keadaan stagnasi industri (wilayah khusus). Dalam wilayah seperti ini, pemerintah perlu mengatur intensif pembiayaan, pengaturan rangsangan untuk prasarana industri, pengaturan konsesi pajak dan sebagainya, sehingga industri tertentu dapat berlokasi di wilayah itu.
3. Perencanaan wilayah yang memperhatikan wilayah pedesaan, dengan pengembangan tanah bagi sektor pertanian dan rekreasi (perencanaan



pedesaan dan wilayah). Hal ini dilakukan untuk memperkecil perbedaan kemakmuran antara pedesaan dan perkotaan.

Untuk meratakan pembangunan, harus digunakan pendekatan perwilayahan atau regionalisasi, yaitu pembagian wilayah nasional dalam satuan wilayah geografi, sehingga setiap bagian mempunyai sifat tertentu yang khas (dapat juga menurut satuan daerah tata praja atau daerah administrasi). Di samping itu, diperlukan desentralisasi yaitu kebijaksanaan yang diputuskan oleh pemerintah regional dan lokal. Dalam desentralisasi itu harus terdapat koordinasi yang baik.

### **C. Teori Pertumbuhan dan Pembangunan Daerah**

Saat ini tidak ada satu teori pun yang mampu menjelaskan pembangunan ekonomi daerah secara komprehensif. Namun demikian, ada beberapa teori yang secara parsial dapat membantu bagaimana memahami arti penting pembangunan ekonomi daerah. Pada hakikatnya, inti dari teori-teori tersebut berkisar pada dua hal, yaitu pembahasan yang berkisar tentang metode dalam menganalisis perekonomian suatu daerah dan teori-teori yang membahas tentang faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah tertentu (Arsyad, 1999).

Pengembangan metode untuk menganalisis suatu perekonomian suatu daerah penting sekali kegunaanya sebagai sarana mengumpulkan data tentang perekonomian daerah yang bersangkutan serta proses pertumbuhannya.

Pengembangan metode analisis ini kemudian dapat dipakai sebagai pedoman

untuk menentukan tindakan-tindakan apa yang harus diambil guna mempercepat laju pertumbuhan yang ada. Akan tetapi di pihak lain harus diakui, menganalisis perekonomian suatu daerah sangat sulit (Arsyad, 1999). Beberapa faktor yang sering menjadi penghambat dalam melakukan analisis perekonomian diantaranya:

- a. Data tentang daerah sangat terbatas terutama kalau daerah dibedakan berdasarkan pengertian daerah nodal (berdasarkan fungsinya).
- b. Data yang dibutuhkan umumnya tidak sesuai dengan data yang dibutuhkan untuk analisis daerah, karena data yang terkumpul biasanya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan analisis perekonomian secara nasional.
- c. Data tentang perekonomian daerah sangat sukar dikumpulkan sebab perekonomian daerah lebih terbuka jika dibandingkan dengan perekonomian nasional. Hal tersebut menyebabkan data tentang aliran-aliran yang masuk dan keluar dari suatu daerah sukar diperoleh.
- d. Bagi negara sedang berkembang, disamping kekurangan data sebagai kenyataan yang umum, data yang terbatas itu pun banyak yang kurang akurat dan terkadang relatif sulit dipercaya, sehingga menimbulkan kesulitan untuk melakukan analisis yang memadai tentang keadaan perekonomian yang sebenarnya di suatu daerah.

Adapun beberapa teori dalam pembangunan daerah yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

## 1. Teori Sektor

Teori ini berkaitan erat dengan perubahan relatif pentingnya sektor-sektor ekonomi di mana laju perubahannya dijadikan indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah. Adapun dasar bagi terjadinya perubahan, dapat dilihat pada sisi permintaan dan penawaran. Pada sisi permintaan, elastisitas pendapatan dan permintaan bagi barang dan jasa yang ditawarkan oleh industri dan aktivitas jasa adalah lebih tinggi daripada bagi proyek pertanian, sehingga adanya peningkatan pendapatan akan diikuti oleh pengalihan relative sumber-sumber dari sektor-sektor pertanian ke sektor industri dan jasa. Pada sisi penawaran, pengalihan tenaga kerja dan modal terjadi akibat adanya perbedaan tingkat pertumbuhan produktivitas dalam sektor-sektor ekonomi tersebut.

Jadi teori sektor menekankan pada adanya perubahan internal daripada adanya hubungan atau perubahan eksternal seperti teori basis ekspor.

Namun sebagai suatu teori yang menjelaskan pertumbuhan, ia tidak memadai oleh karena tidak menawarkan pemahaman tentang penyebab dari pertumbuhan itu.

## 2. Teori Basis Ekspor

Teori basis ekonomi adalah salah satu teori atau pendekatan yang bertujuan untuk menjelaskan perkembangan dan pertumbuhan wilayah. Teori basis ekspor merupakan bentuk model pendapatan wilayah yang paling sederhana. Pentingnya teori ini terletak pada kenyataan bahwa ia memberikan kerangka teoritik bagi banyak studi multiplier (pengganda) wilayah secara empiris. Asumsi pokok dari teori ini adalah bawa ekspor

merupakan satu-satunya unsur otonom dalam pengeluaran, dan komponen pengeluaran lainnya dianggap sebagai fungsi dari pendapatan (Sirojuzilam dan Mahalli, 2010).

Teori basis ekspor murni dikembangkan pertama kali oleh Tiebout. Teori ini membagi kegiatan produksi/jenis pekerjaan yang terdapat di dalam satu wilayah atas sektor basis dan sektor non basis. Kegiatan basis adalah kegiatan yang bersifat exogenous artinya tidak terikat pada kondisi internal perekonomian wilayah dan sekaligus berfungsi mendorong tumbuhnya jenis pekerjaan lainnya. Sedangkan kegiatan non basis adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah itu sendiri. Oleh karena itu, pertumbuhannya tergantung kepada kondisi umum perekonomian wilayah tersebut. Artinya, sektor ini bersifat endogenous (tidak bebas tumbuh). Pertumbuhannya tergantung kepada kondisi perekonomian wilayah secara keseluruhan (Tarigan, 2006).

Aktivitas basis memiliki peranan sebagai penggerak utama (*primer mover*) dalam pertumbuhan suatu wilayah. Semakin besar ekspor suatu wilayah ke wilayah lain akan semakin maju pertumbuhan wilayah tersebut, dan demikian sebaliknya. Setiap perubahan yang terjadi pada sektor basis akan menimbulkan efek ganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian regional (Adisasmita, 2005).

Sektor unggulan adalah sektor yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah dan mempunyai keuntungan kompetitif (*competitive advantage*) yang cukup tinggi. Sektor unggulan adalah sektor yang menjadi

tulang punggung perekonomian namun kurang memiliki keunggulan komparatif yang memadai. Sedangkan sektor terbelakang merupakan sektor yang bukan merupakan tulang punggung perekonomian dan tidak memiliki keunggulan komparatif (Riadi, 2012)

Teori basis ekonomi mendasarkan pandangannya bahwa laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut. Pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (Arsyad, 1999). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor. Untuk menganalisis basis ekonomi suatu wilayah, salah satu teknik yang lazim digunakan adalah kuosien lokasi (*Location Quotient, LQ*). *Location Quotient* digunakan untuk mengetahui seberapa besar tingkat spesialisasi sektor-sektor basis atau unggulan (*leading sectors*). Dalam teknik LQ berbagai peubah (faktor) dapat digunakan sebagai indikator pertumbuhan wilayah, misalnya kesempatan kerja (tenaga kerja) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah.

### **3. Teori Pusat Pertumbuhan**

*Theory growth poles* adalah salah satu teori yang dapat menggabungkan antara prinsip-prinsip konsentrasi dengan desentralisasi secara sekaligus (Alonso dalam Sirojuzilam dan Mahalli, 2010). Dengan demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan

pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu.

Menurut Arsyad (1999) konsep pusat pertumbuhan diperkenalkan pada tahun 1949 oleh Francois Perroux yang mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai “pusat dari pancaran gaya sentrifugal dan tarikan gaya sentripetal”. Menurut Rondinelli dan Unwin *dalam* Arsyad (1999) bahwa teori pusat pertumbuhan didasarkan pada keniscayaan bahwa pemerintah di negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan investasi yang besar pada industri padat modal di pusat kota. Teori pusat pertumbuhan juga ditopang oleh kepercayaan bahwa kekuatan pasar bebas melengkap kondisi terjadinya *trickle down effect* (dampak penetesan ke bawah) dan menciptakan *spread effect* (dampak penyebaran) pertumbuhan ekonomi dari perkotaan ke pedesaan. Menurut Stohr *dalam* Arsyad (1999), konsep pusat pertumbuhan mengacu pada pandangan ekonomi neo-klasik. Pembangunan dapat dimulai hanya dalam beberapa sektor yang dinamis, mampu memberikan output rasio yang tinggi dan pada wilayah tertentu, yang dapat memberikan dampak yang luas (*spread effect*) dan dampak ganda (*multiple effect*) pada sektor lain dan wilayah yang lebih luas. Sehingga pembangunan sinonim dengan urbanisasi (pembangunan di wilayah perkotaan) dan industrialisasi (hanya pada sektor industri). Pandangan ekonomi neo-klasik berprinsip bahwa kekuatan pasar akan menjamin ekuilibrium (keseimbangan) dalam distribusi spasial

ekonomi dan proses *trickle down effect* atau *centre down* dengan sendirinya akan terjadi ketika kesejahteraan di perkotaan tercapai dan dimulai dari level yang tinggi seperti kawasan perkotaan ke kawasan yang lebih rendah seperti kawasan hinterland dan perdesaan melalui beberapa mekanisme yaitu hirarki perkotaan dan perusahaan-perusahaan besar.

Namun demikian kegagalan teori pusat pertumbuhan karena *trickle down effect* (dampak penetesan ke bawah) dan *spread effect* (dampak penyebaran) tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland. Selain itu respon pertumbuhan di pusat tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Arsyad, 1999).

#### D. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian yang telah dilakukan mengenai pengembangan wilayah sebelumnya adalah:

<b>Nama</b>	Amin Pujiatai (2009)
<b>Judul</b>	Analisis Kawasan Andalan Di Jawa Tengah
<b>Alat Analisis</b>	Tipologi Klassen, Indeks Spesialisasi, LQ
<b>Hasil Analisis</b>	Berdasarkan analisis Tipologi Klassen dapat disimpulkan bahwa terdapat tujuh kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi cepat maju dan cepat tumbuh, empat kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi daerah maju tetapi tertekan, sembilan kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi berkembang cepat dan lima belas kabupaten/kota yang termasuk klasifikasi relatif tertinggal. Hasil analisis LQ menunjukkan bahwa sektor unggulan di kawasan andalan cenderung didominasi sektor sekunder dan tersier. Analisis indeks spesialisasi regional menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang termasuk kawasan andalan relatif cenderung lebih tinggi daripada di kawasan bukan andalan. Indeks spesialisasi regional antarkawasan andalan mengarah ke

	diversifikasi sektor usaha. Sedangkan antara kawasan andalan bukan andalan cenderung mengarah kespesialisasi sektor usaha, demikian pula antar kawasan bukan andalan juga mengarah ke spesialisasi.
<b>Nama</b>	Bayu Wijaya dan Hastarini Dwi Atmanti (2006)
<b>Judul</b>	Analisis pengembangan Wilayah dan sektor potensial Guna mendorong Pembangunan di kota salatiga
<b>Alat Analisis</b>	LQ, Shift Shere, Analisis Gravitasi, Analisis SWOT
<b>Hasil Analisis</b>	Sektor-sektor yang termasuk tipologi I adalah sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa, dimana sektor-sektor tersebut merupakan basis sekaligus pertumbuhannya cepat sehingga dapat menjadi sector yang strategis untuk dikembangkan lebih lanjut. Sedangkan sektor ekonomi yang termasuk tipologi II adalah listrik, gas dan air bersih. Sektor ini mempunyai nilai $LQ > 1$ yang berarti merupakan basis namun karena pertumbuhannya lambat maka perlu perhatian karena cukup berpotensi untuk dikembangkan Untuk tipologi III yaitu sektor pertanian dan industri pengolahan pengolahan. Sektor ini layak untuk dikembangkan menjadi sektor basis berdasarkan pertumbuhan ekonomi yang cepat, dan yang term asuk tipologi IV adalah sektor ertambangan dan penggalian serta sektor perdagangan, hotel dan restoran. Sektor ini dianggap tidak berpotensi karena bukan sektor basis dan pertumbuhan ekonominya lambat. Jadi ada 4 sektor ekonomi yang sangat berpotensi untuk dikembangkan yaitu sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi, sektor k-euangan, persewaan danjasa perusahaan, sektor jasa-jasa, dan ada 1 sektor yang potensial untuk dikembangkan yaitu sektor listrik, gas dan air bersih, serta ada 2 sektor yang perlu untuk dikembangkan lebih lanjut yaitu sektor petanian dan sektor sektor industri pengolahan.
<b>Nama</b>	Diah Setyorini Gunawan dan Ratna Setyawati Gunawan (2008)
<b>Judul</b>	Identifikasi pengembangan wilayah kabupaten-kabupaten Anggota lembaga regional Barlingmascakeb
<b>Alat Analisis</b>	Tipologi Klassen, MRP, LQ,CQ
<b>Hasil Analisis</b>	Ditinjau dari tingkat pertumbuhan dan pendapatan per kapita, pada periode 1995-2002, dari lima kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB hanya Kabupaten Cilacap yang termasuk dalam klasifikasi daerah cepat maju dan cepat tumbuh. Kabupaten Purbalingga termasuk dalam klasifikasi daerah berkembang cepat. Anggota-anggota BARLINGMASCAKEB yang lain,



	<p>yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen termasuk dalam klasifikasi daerah relatif tertinggal.</p> <p>2. Berdasarkan hasil <i>overlay</i> antara analisis MRP dan analisis LQ dapat diketahui sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial kabupaten-kabupaten anggota RLINGMASCAKEB. 3. Berdasarkan identifikasi lebih lanjut terhadap sektor ekonomi unggul dan sektor ekonomi potensial diperoleh informasi subsektor ekonomi unggul dan subsektor ekonomi potensial kabupaten- kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB. 4. Pada periode 1995 dan 2002, terdapat perbedaan yang besar pada struktur ekonomi antara Kabupaten Cilacap dengan kabupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, dan Kabupaten Kebumen memiliki struktur ekonomi yang kurang lebih sama. 5. Ditinjau dari tingkat aksesibilitas, Kabupaten Purbalingga memiliki posisi wilayah yang paling menguntungkan dalam berinteraksi dengan kabupatenkabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya. Kabupaten Purbalinggamemiliki tingkat aksesibilitas yang paling tinggi dalam wilayah lembaga regional BARLINGMASCAKEB, diikuti oleh Kabupaten Banyumas yang menempati peringkat kedua dan Kabupaten Cilacap yang menempati peringkat ketiga. Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kebumen memiliki posisi wilayah yang kurang menguntungkan dalam berinteraksi dengan abupaten-kabupaten anggota BARLINGMASCAKEB lainnya.</p>
--	--